

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. , 2008, Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris, CV Mandar Maju, Bandung. _, 2011, Hukum Notaris di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Afandi, Ali, 1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Radar Jaya Offset, Jakarta. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rafa Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, Kumpulan Tulisan di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1996, Hukum Waris Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, Sunarjati, 1991, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakart
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Bussiness Law, Yogyakarta.
- Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.

Pembedaan Kewenangan Pembuatan Surat Tanda Bukti Ahli Waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

SRI MALIANI, R.A.Antari Innaka.T., S.H., M. Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perangin, Effendi, 2003, Hukum Waris, Raja Grafindo, Jakarta.

- Sasangka, Hari, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

_______, & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif,* Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

- Soesanto, R, 1982, Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Genta, Yogyakarta
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634



Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis SRI MALIANI, R.A.Antari Innaka.T., S.H., M. Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria No. DPT/ 12/63/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

C. Jurnal / Makalah / Tesis

- Adjie, Habib, "Konsep Dasar Kewarganegaraan dan Unifikasi Keterangan Hak Waris dengan Akta Notaris yang berlaku untuk Seluruh Warga Negara Indonesia", Seminar Nasional Keragaman Hukum Waris di Indonesia dalam Pembuatan Surat dan Akta Keterangan Hak Mewaris, Sukoharjo, 21 Januari 2017
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi, "Kewarganegaraan dan Warisan pada perkawinan Campuran", Seminar Nasional Keragaman

Hukum Waris di Indonesia dalam Pembuatan Surat dan Akta Keterangan Hak Mewaris, Sukoharjo, 21 Januari 2017

Masuli, Hoiril, "Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009

Novel, Adilah Talib, "Pluralisme Peraturan Surat Keterangan Waris untuk Peralihan Hak atas Tanah", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010

D. INTERNET

Balai Harta Peninggalan Jakarta, http://bhpjakarta.info

Putranto, Nurhendro, Penjabaran Tugas BHP, diakses dari http://www.nurhendroputranto.com/, diakses pada 1 Februari 2017